

# ***GOOD GOVERNANCE* BIDANG PENDIDIKAN di BANTEN**

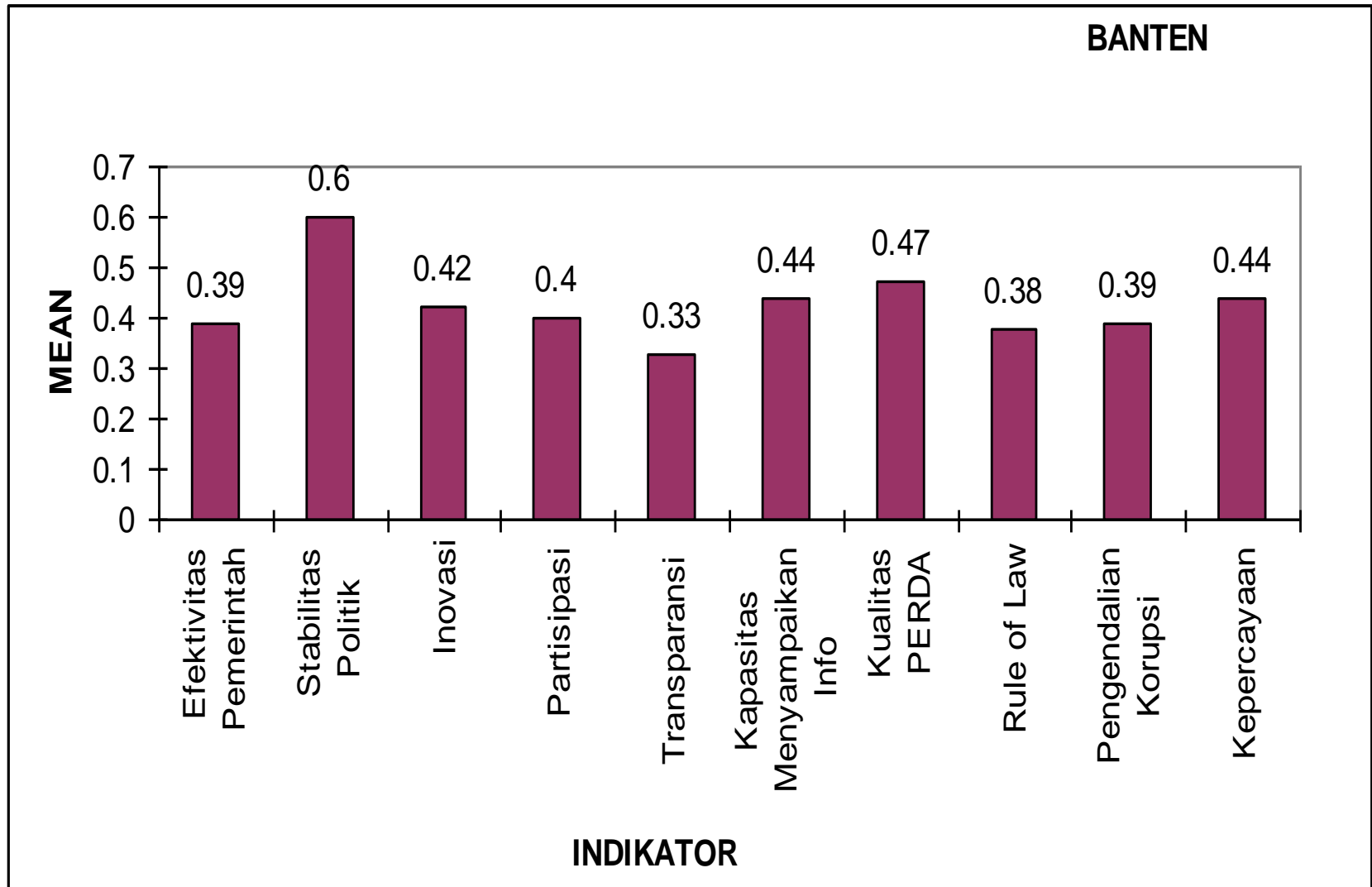
**Kandung Sapto Nugroho  
Program Studi Ilmu Administrasi  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten**

**Di Presentasikan pada Simposium Nasional Satu Dasawarsa Otonomi Daerah PP  
OTODA Universitas Brawijaya  
1 Desember 2010**

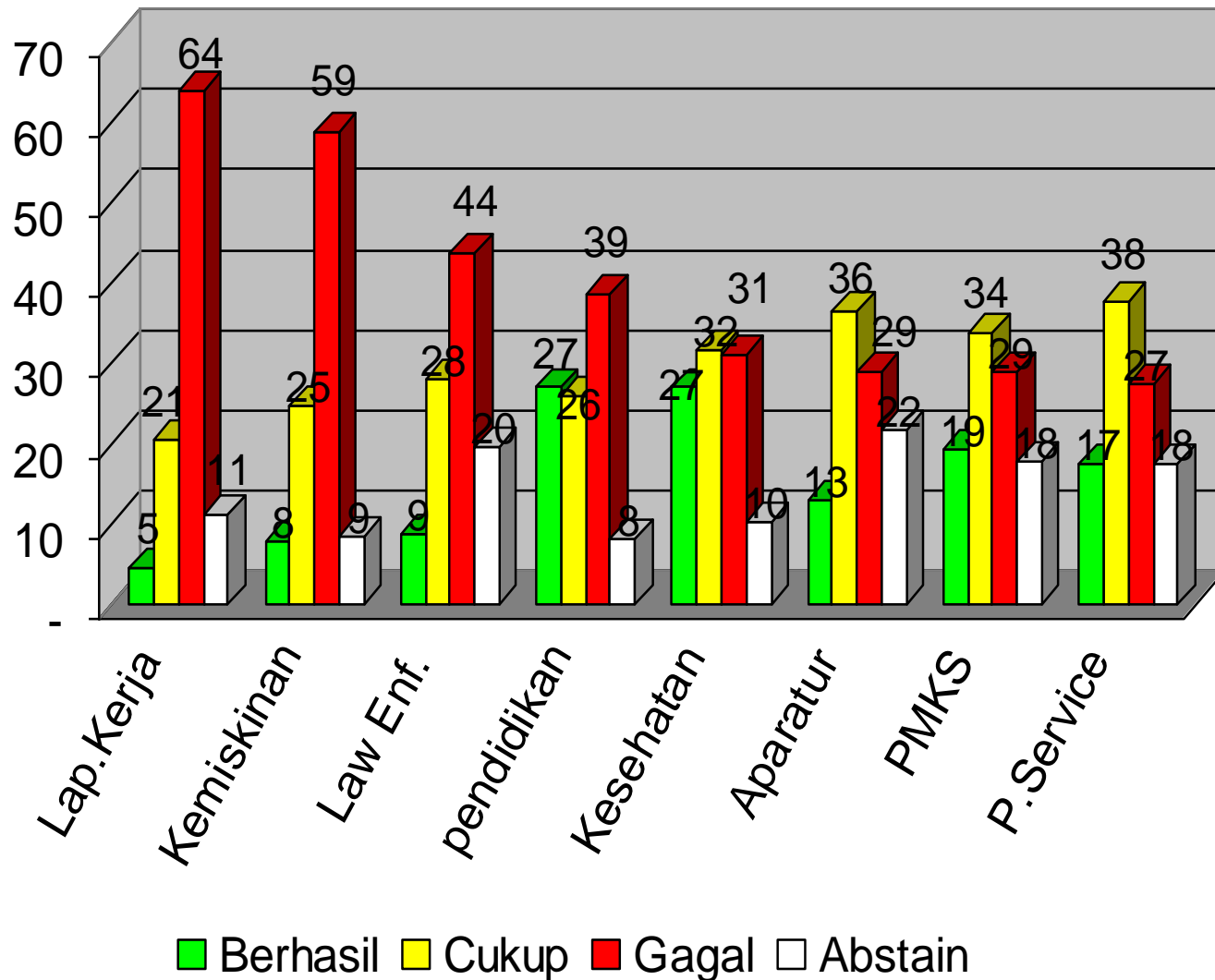
# Latar belakang

- Rencana Strategi Dinas Pendidikan 2007-2012 : Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* guna memperbaiki citra publik, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, serta martabat pemerintah dan masyarakat Banten
- Konsep dasar dari *good governance* menghendaki adanya pembagian kekuasaan (*share of power*) dan mengendaki adanya kesetaraan antar ketiga pilar *good governance* yakni *the state*, *privat* dan *civil society* dan bukan untuk saling mendominasi satu sama lain

# PSKK UGM, 2006

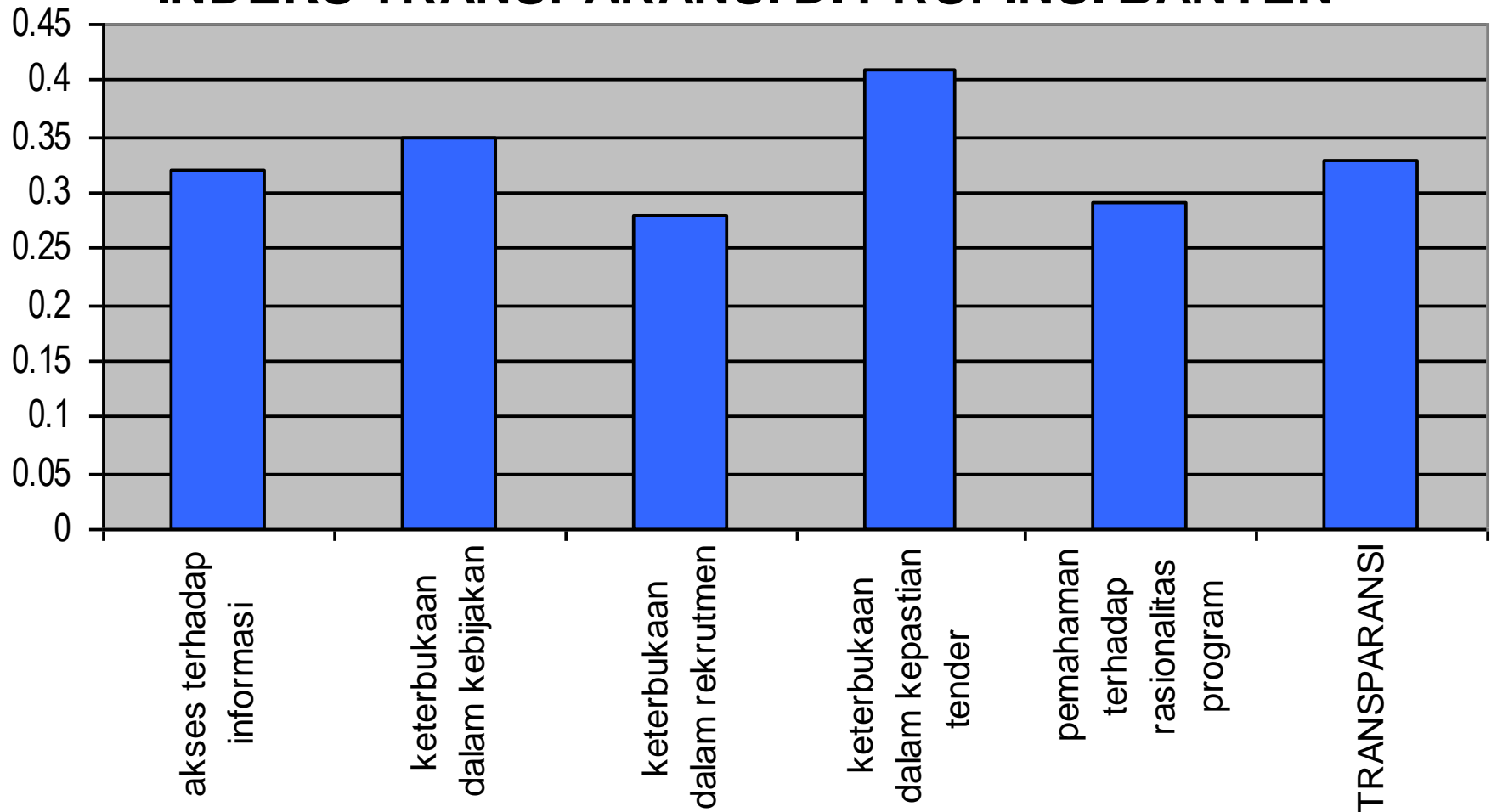


# Akses Riset Indonesia, 2006



# PSKK UGM, 2006

## INDEKS TRANSPARANSI DI PROPINSI BANTEN



# Perumusan Masalah

- Bagaimanakah tingkat penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Banten?

# KERANGKA TEORI

- Konsep dasar dari *good governance* menghendaki adanya pembagian kekuasaan (*share of power*) dan mengendaki adanya kesetaraan antar ketiga pilar *good governance* yakni *the state*, *privat* dan *civil society* dan bukan untuk saling mendominasi satu sama lain (Praktikno, 2004: 6)

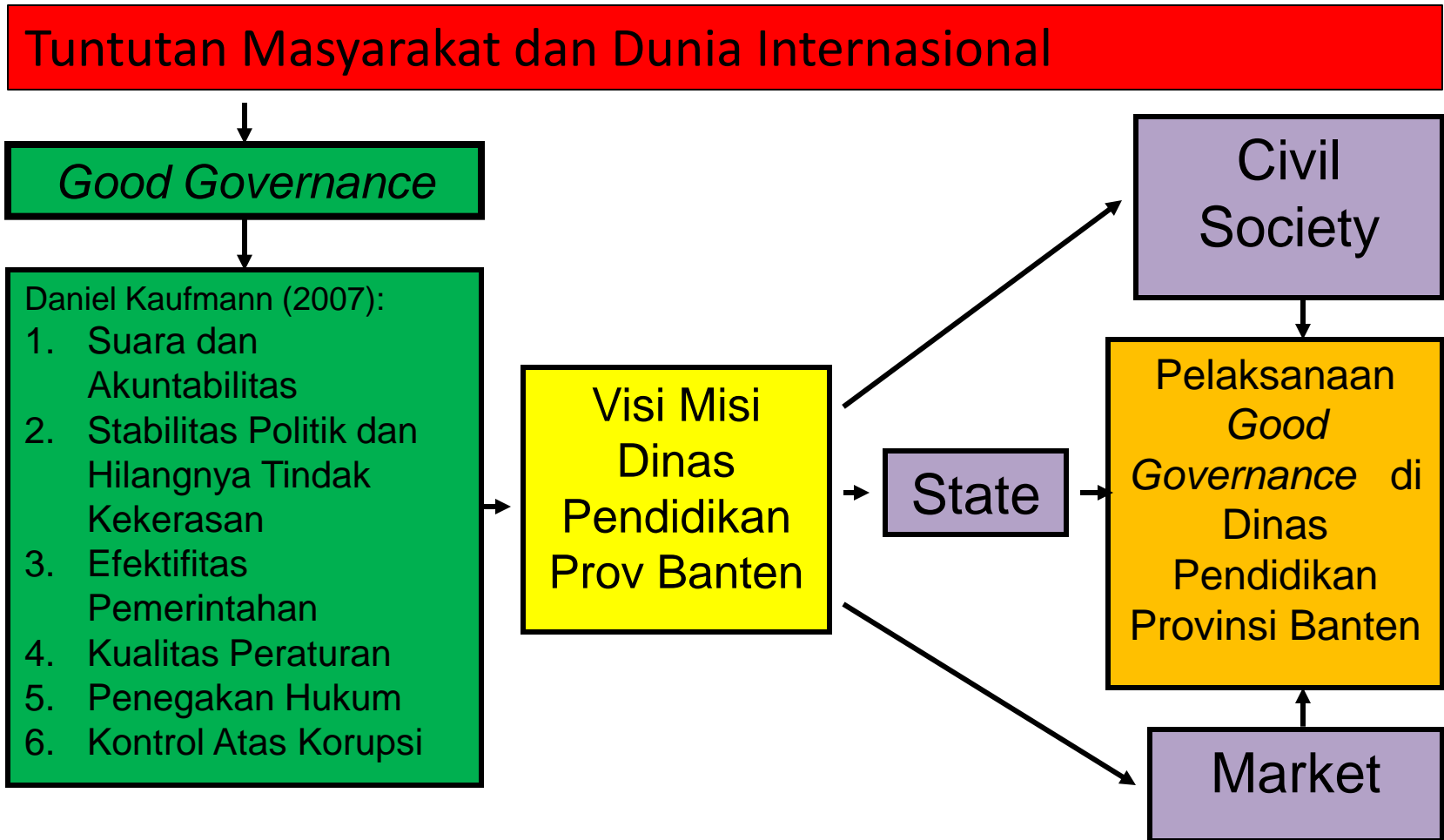
# **Prinsip *Good Governance* :**

Kaufmann dkk, (2007: 3-4):

1. Suara dan Akuntabilitas
2. Stabilitas Politik dan hapusnya tindak kekerasan.
3. Efektifitas Pemerintahan.
4. Kualitas Peraturan (perundangan).
5. Penegakan Hukum.
6. Kontrol Atas Korupsi (pengawasan).



# Kerangka Pemikiran



# METODOLOGI

- Penelitian ini menggunakan metode survai dengan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif.
- Sasaran penelitian ini adalah seluruh stakeholders pendidikan di Provinsi Banten dalam hal ini seluruh jajaran birokrasi pendidikan, seluruh lapisan *civil society*, serta seluruh pengusaha yang berinteraksi dengan dunia pendidikan

# Lanjutan.....

- Sampelnya [Daniel Kaufmann dkk. (2007), dan PSKK UGM (2006)] bahwa dari ketiga pilar dari *good governance* masing-masing 30 responden, dengan teknik *quota sampling*, karena begitu besarnya jumlah stakeholders *good governance* yang menjadi populasi penelitian, sehingga total sampel akan berjumlah 90 responden, selanjutnya dalam menentukan responden digunakan teknik *purposive sampling*, dengan asumsi bahwa responden mengetahui permasalahan yang hendak diteliti.

# Interpretasi Hasil Penelitian

- Tabel 48. Prosentase Tingkat Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Dinas Pendidikan Provinsi Banten

## Pembahasan

Tabel 49. Pedoman Penilaian Tingkat *Good Governance* dari TUGI, *United Nations Development Programme*

# Prosentase Tingkat Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Dinas Pendidikan Provinsi Banten

No	<i>Point of View</i>	Total Nilai GG	Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>					
			SA	SPHK	EP	KP	PH	KAK
1	<i>The State</i>	62,04	17,69	16,66	19,93	23,11	23,51	23,61
2	<i>The Market (Private Sector)</i>	47,64	15,11	14,83	14,30	18,75	18,81	15,71
3	<i>Civil Society</i>	44,77	13,94	13,77	13,33	17,91	17,85	15,01
4	Rata-rata/Total	51,48	46,75	45,27	47,57	59,77	60,18	54,34

Sumber: Data diolah, 2009

# lanjutan

- Keterangan :
- SA : Suara dan Akuntabilitas
- SPHK : Stabilitas Politik dan Hilangnya Tindak Kekerasan
- EP : Efektifitas Pemerintahan
- KP : Kualitas Peraturan
- PH : Penegakan Hukum
- KAK : Kontrol atas Korupsi

## Pedoman Penilaian Tingkat *Good Governance* dari TUGI, *United Nations Development Programme*

No.	Kategori	Nilai	Keterangan
1	<i>Very Good</i>	85% - 100%	<i>Keep it up</i>
2	<i>Good</i>	65% - 84%	<i>But still room to improve</i>
3	<i>Fair</i>	50% - 64%	<i>Can do much better</i>
4	<i>Poor</i>	35% - 49%	<i>More commitment and effort needed</i>
5	<i>Very Poor</i>	Below 35%	<i>Something is drastically wrong</i>

Sumber: TUGI, UNDP 1997.

# Kutipan Wawancara

- “sampai sekarang belum juga disahkannya peraturan daerah tentang transparansi dan partisipasi publik yang sudah digagas sejak 2006 dan sepertinya tidak akan terwujud oleh anggota legislatif periode sekarang ini” (KM, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Provinsi Banten, 13 mei 2009)
- “sekarang ini muncul tuntutan yang sangat kuat untuk mengganti Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, yaitu Drs. H. Eko Endang Koswara, M.Si, karena kinerjanya dianggap gagal” (MHF, Baraya Post, 26 Mei 2009).



# Kesimpulan per pilar

- bahwa tingkat penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Pendidikan Provinsi Banten adalah 51,48 persen termasuk dalam kategori *fair governance* atau masih moderat dan tidak sepenuhnya gagal.
- Dimana menurut pilar *the state* adalah sebesar 62,04 persen (*fair governance*), kemudian menurut pilar *civil society* adalah sebesar 44,77 persen (*poor governance*) dan menurut pilar *the market* adalah sebesar 47,64 persen (*poor governance*).

# KESIMPULAN per prinsip

- Prinsip suara dan akuntabilitas tingkat penerapannya mencapai 46,75 = *poor governance*.
- Prinsip stabilitas politik dan hilangnya tindak kekerasan tingkat penerapannya mencapai 45,27 = *poor governance*.
- Prinsip efektifitas pemerintahan tingkat penerapannya mencapai 47,57 = *poor governance*.
- Prinsip kualitas peraturan tingkat penerapannya mencapai 59,77 = *fair governance*.
- Prinsip penegakan hukum tingkat penerapannya mencapai 60,18 = *fair governance*.
- Prinsip kontrol atas korupsi tingkat penerapannya mencapai 54,34 = *fair governance*.

# Saran

- sinergi antara semua pilar *good governance*, artinya ketiga pilar yang ada yakni *the state, the market* dan *civil society*
- segera digagas sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang pengarasutamaan *good governance* di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten untuk kemudian menjadi sebuah *diagnostic tool for governance assessment* yang memudahkan stakeholders dalam mengukur kinerja lembaga publik.